

PARLEMEN

Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidakterersediaan Vaksin Meningitis

Updates. - WARTAPARLEMEN.COM

Sep 27, 2022 - 18:37



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX [DPR RI](#) Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab

dalam penanganan keterbatasan vaksin meningitis di Indonesia. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX [DPR RI](#) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dijelaskan bahwa izin edar bagi 2 jenis vaksin meningitis yang beredar telah diterbitkan pada beberapa waktu lalu sedangkan load release belum ada karena belum ada dokumen yang diterima oleh lembaga tersebut.

“Kemarin kita sudah sampaikan (masalah ketidaktersediaan vaksin meningitis) ke Kementerian Kesehatan juga. Kita berharap sebenarnya ini jangan saling lempar karena ini kebutuhan real di masyarakat. Masyarakat butuh dan ini harus disediakan.” tegas Ninik, sapaan akrabnya, kepada medi usai menghadiri RDP Komisi IX [DPR RI](#) dengan Kepala BPOM, di Gedung Nusantara I, Senayan, [Jakarta](#), Selasa (27/9/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ([PKB](#)) tersebut juga mengungkapkan sulitnya mendapatkan vaksin meningitis di banyak tempat bisa berdampak langsung pada keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Selain itu perlu juga diperhatikan jeda waktu antara pemberian vaksin hingga keberangkatan.

“Terlepas dari itu semua, ini sangat mengganggu karena efeknya itu luar biasa. Contoh, di [Surabaya](#) ada rombongan jemaah umrah yang tidak boleh berangkat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Juanda karena (vaksin) meningitisnya kurang dari 14 hari. Padahal mereka tidak mudah loh mencari (vaksin) meningitis. Efeknya seperti itu, padahal mereka sudah booking dan macem-macamnya,” ujar Ninik.

Ninik menyayangkan kondisi hilangnya vaksin meningitis ini tidak segera ditangani. Padahal menurutnya masalah terkait vaksin meningitis telah ada sejak beberapa waktu silam saat mulai diberangkatkannya jemaah haji dan umrah pasca penutupan batas negara.

“Kemarin itu (vaksin) meningitis kita sempat numpuk banyak. Kita sedia banyak, ratusan ribu dan dua tahun tidak terpakai. Sempat awal-awal ketika umrah dibuka, haji mulai boleh itu sempat ramai (vaksin) meningitisnya masih boleh dipake enggak? Ternyata hasil kajian Badan POM vaksinnya masih bisa dipakai walaupun 2 tahun tidak digunakan karena disimpan di tempat yang baik,” jelasnya.

Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) [Jawa Timur](#) III itu, polemik hilangnya vaksin meningitis ini bisa menjadi salah satu dampak dari transisi pandemi. Menurutnya dibutuhkan penyesuaian dari sebelum pandemi ke kondisi pandemi dan sebaliknya setelah pandemi usai. Meski begitu, ia berharap kondisi ini seharusnya tidak menjadi penghalang.

Pada kesempatan tersebut, Ninik menegaskan bahwa meski sulit didapatkan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh tidak boleh diabaikan karena belum ada pernyataan resmi Kerajaan Arab Saudi terkait relaksasi vaksin meningitis bagi pendatang. Selain itu, Ninik juga mengingatkan agar masyarakat juga tetap melindungi dirinya.

“Saya pikir bukan hanya persoalan relaksasi tapi juga ketahanan tubuh seperti apa? Kalau Covid-19 sudah relaksasi masa meningitis juga relaksasi. Kita tahu itu juga sangat berbahaya,” ungkap Ninik.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, dijelaskan bahwa vaksin meningitis dan vaksin Covid -19 masih menjadi kewajiban bagi jamaah umroh dan haji yang datang dari semua negara. Proteksi dari vaksin meningitis dapat bertahan dalam rentang 3-5 tahun di dalam tubuh setelah vaksinasi dilakukan, tergantung jenis vaksin yang digunakan. (uc/sf)